

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	25,01
		Predikat SAKIP	BB
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	60%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.442.006.726,00	APBD Perubahan
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 357.683.451.594,00	APBD Perubahan
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.352.489.878,00	APBD Perubahan

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mulai Eselon III sampai dengan Level Staf dapat dilihat dalam lampiran dokumen LKjIP ini.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2022, anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pada APBD Perubahan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	14.265.982.498	3,89%
Belanja Modal	828.992.000	0,23%
Belanja Tidak Terduga	5.253.896.000	1,43%
Belanja Transfer	346.129.077.700	94,45%
Jumlah	366.477.948.198	100%

Pagu anggaran belanja tahun anggaran 2022 dialokasikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 3 program, 14 kegiatan dan 60 sub kegiatan disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Nama Program	Nama Kegiatan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
III.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 diperoleh dengan:

1. membandingkan antara target dan realisasi tahun 2022;
2. membandingkan hasil capaian kinerja dengan sasaran strategis; dan
3. menganalisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran hingga sub kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara

langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcome* yang lebih tinggi (*ultimate outcome*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s/d < 85 : Berhasil
3. 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
4. < 55 : Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Target dalam Pengukuran Kinerja ini menggunakan data dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 per-sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,01	n/a	n/a
		2. Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	n/a	n/a

2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%	100%	100%
		2. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	60%	71%	119%
Rata-rata capaian kinerja (untuk indikator kinerja pada sasaran strategis 2 dan 3)					106,33%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan. Capaian sasaran tahun 2022 melalui indikator kinerja sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun (13 Februari 2023) belum dapat ditampilkan karena belum dilaksanakan Reviu atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dan sedang dilaksanakan Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	25,01	n/a	n/a
2.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	n/a	n/a

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022
Dibandingkan dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022
Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Capaian 2022 terhadap target Akhir (%)
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	37	n/a	n/a
2.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	n/a	n/a

Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah ditetapkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada *stakeholder*. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah" dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	Persen	100	100	100%
2.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persen	100	100	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 berdasarkan realisasi indikator kinerja					100%

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022
Dibandingkan dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	n/a	n/a	n/a	n/a

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022
Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Capaian 2022 terhadap target Akhir (%)
1.	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%	100%	100%

2.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
----	--	------	------	------

Indikator 1: Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan

Untuk menghitung capaian kinerja indikator diatas, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan} = \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan pelayanan penatausahaan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan pelayanan penatausahaan keuangan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan untuk tahun 2022, dapat tercapai dengan realisasi 100%. Dalam menyediakan dokumen perencanaan anggaran dan memberikan pelayanan penatausahaan keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Pengajuan pencairan anggaran yang masih menumpuk di akhir tahun anggaran,
2. Lamanya pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah digunakan, sehingga proses ganti uang yang lambat menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam penyediaan dokumen perencanaan anggaran dan pelayanan penatausahaan keuangan maka akan ditempuh langkah-langkah berikut:

1. Membuat surat edaran mengenai pengajuan pencairan anggaran yang tidak menumpuk di akhir tahun,
2. Menghimbau secara langsung kepada PD pengelola dana DAK dan Dana Desa pada saat rapat koordinasi agar mematuhi jadwal pelaksanaan

kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui PMK atau KMK,

3. Mengingatkan PD agar segera mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan dan segera mengajukan Ganti Uang agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal.

Indikator 2: Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Untuk menghitung capaian kinerja indikator diatas, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)} = \frac{\text{Laporan Keuangan PD yang Sesuai Ketentuan}}{\text{Laporan Keuangan PD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)} = \frac{50}{50} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, capaian kinerja untuk indikator Persentase Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk tahun 2022, dapat tercapai dengan realisasi 100%. Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Kesalahan pencatatan akun oleh bendahara pengeluaran PD dalam penyusunan laporan keuangan,
2. Bendahara pengeluaran PD tidak mencantumkan perhitungan pajak dan kurang memahami alur penyusunan arus kas.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam proses pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah maka akan ditempuh langkah-langkah berikut:

1. Bendahara pengeluaran PD diwajibkan mengoreksi setiap perubahan maupun pencatatan akun dalam laporan keuangan,

2. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan khususnya di penatausahaan dan pertanggungjawaban setiap PD.

Sasaran 3: Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Sasaran meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	Persen	60	71	119%

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022
Dibandingkan dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	71%	n/a	n/a	n/a	n/a

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022
Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Capaian 2022 terhadap target Akhir (%)
1.	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	68%	71%	104,41%

Indikator: Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib

Untuk menghitung capaian kinerja indikator diatas, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib} = \frac{\text{Laporan Inventaris BMD PD yang Sesuai Ketentuan}}{\text{Laporan Inventaris BMD PD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib} = \frac{210}{295} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, capaian kinerja untuk indikator Persentase Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib untuk tahun 2022, dapat tercapai dengan realisasi 119% dari target. Meskipun capaian pada tahun 2022 dikategorikan Sangat Berhasil apabila dibandingkan dengan target, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Pada awalnya Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu direncanakan untuk ditetapkan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran. Namun melihat kondisi perubahan harga pada tahun 2022 tidak terlalu signifikan terhadap kebutuhan belanja barang, sehingga hanya dilakukan satu kali Penetapan Peraturan Bupati tersebut demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan,
2. Pelaksanaan sertifikasi tanah yang melalui berbagai tahapan mulai dari pengajuan usulan, survei lapangan bersama tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu hingga penetapan sertifikat tanah memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga terdapat beberapa usulan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama. Usulan sertifikasi tanah yang telah diajukan kepada BPN sebanyak 198 usulan. Adapun sertifikat yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sejumlah 80 buah yang terdiri dari 28 sertifikat

berdasarkan usulan, 37 sertifikat program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari total 198 usulan sertifikasi tanah, terdapat 28 usulan yang termasuk dalam lokasi Kawasan Hutan Lindung sehingga tidak dapat diterbitkan sertifikat tanah,

3. Terdapat beberapa dokumen kelengkapan yang masih belum tersedia untuk pengajuan usulan sertifikat tanah seperti Surat Keterangan Tanah, Dokumen Hibah dari masyarakat, dan dokumen kelengkapan lainnya,
4. Pembatalan hasil penilaian yang telah ditetapkan, hal ini terjadi khususnya terhadap penilaian yang dilakukan atas bangunan dan/atau gedung yang akan dilakukan rehab atau pembangunan baru. Pembatalan ini seringkali terjadi akibat tidak tersedianya anggaran untuk melakukan rehab atau pembangunan baru pada instansi terkait. Adapun jumlah usulan yang telah dilakukan penilaian pada Triwulan IV sebanyak 28 unit, akan tetapi hanya 10 unit yang ditetapkan hingga laporan penilaian disusun,
5. Beberapa bangunan dan/atau gedung yang diusulkan untuk dilakukan penilaian tidak diketahui pencatatannya pada Kartu Inventaris Barang (KIB).

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, akan ditempuh langkah-langkah berikut:

1. Pada perencanaan tahun anggaran berikutnya akan direncanakan hanya satu kali penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,
2. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah akan terus melakukan koordinasi dan kontrol terhadap proses pelaksanaan usulan sertifikasi tanah,
3. Melakukan koordinasi dengan pihak yang tinggal di sekitar lokasi tanah berada dan/atau dengan ahli waris khusus tanah hibah dari masyarakat,
4. Terhadap usulan penilaian atas bangunan dan/atau gedung yang akan dilakukan rehab atau pembangunan baru diwajibkan melampirkan dokumen bukti ketersediaan anggaran pada DPA sebagai syarat mengajukan usulan penilaian,

5. Melakukan inventarisasi dan pembukuan terhadap aset-aset pemerintah daerah yang belum ada/diketahui pencatatannya.

3.3 Realisasi Anggaran

Seiring dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan berdasarkan pada 'value for money'. Selain itu, pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

Target belanja sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2022

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7.442.006.726	7.331.377.676	98,51
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		124.242.146	124.241.686	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.025.420	45.024.960	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.372.700	13.372.700	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.730.256	13.730.256	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.511.960	13.511.960	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.132.410	13.132.410	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12.734.700	12.734.700	100

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.734.700	12.734.700	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.926.451.942	3.897.587.808	99,26
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.489.073.698	3.466.810.908	99,36
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.514.720	14.514.200	100
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	374.940.000	368.340.000	98,24
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.932.380	24.932.380	100
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.991.144	22.990.320	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.486.300	18.242.830	98,68
13	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.753.600	7.753.600	100
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.732.700	10.489.230	97,73
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	709.789.960	703.989.680	99,18
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	88.363.000	88.363.000	100
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	460.013.960	459.656.500	99,92
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.413.000	155.970.180	96,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.036.711.378	1.030.757.437	99,43
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.252.200	8.252.200	100
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.729.590	123.532.416	97,48
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.569.650	72.637.260	98,73
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.820.000	8.780.000	99,55
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.400.000	50.400.000	100
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	736.599.938	735.155.561	99,80

24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32.340.000	32.000.000	98,95
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		649.150.000	646.268.000	99,56
25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	480.000.000	480.000.000	100
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.150.000	166.268.000	98,30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		621.757.700	588.406.835	94,64
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.410.000	2.070.000	18,14
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.600.000	111.534.865	92,48
29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.550.000	68.755.000	98,86
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.197.700	406.046.970	96,63
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		355.417.300	321.883.400	90,56
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.469.300	307.973.400	90,19
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.948.000	13.910.000	99,73
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		357.683.451.594	353.875.591.770	98,94
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		781.484.000	779.172.300	99,70
33	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	54.158.400	54.158.400	100
34	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.612.400	54.612.400	100
35	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.810.000	3.810.000	100
36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.502.600	3.502.600	100
37	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	285.114.000	284.699.800	99,85
38	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	279.396.600	278.265.700	99,60

	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
39	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24.439.200	24.439.200	100
40	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	76.450.800	75.684.200	99,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	922.947.838	920.507.934	99,74
41	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	133.327.880	132.236.300	99,18
42	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	90.141.610	89.992.700	99,83
43	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	41.395.548	41.310.400	99,79
44	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	658.082.800	656.968.534	99,83
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	712.868.974	683.030.750	95,81
45	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	83.846.960	83.304.750	99,35
46	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	45.947.080	44.602.000	97,07
47	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.970.000	5.970.000	100
48	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	174.361.094	172.971.900	99,20

	Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
49	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	134.221.220	133.970.100	99,81
50	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	268.522.620	242.212.000	90,20
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	351.383.097.700	350.741.937.586	99,82
51	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	343.701.431.700	343.107.203.946	99,83
52	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.253.896.000	5.206.963.640	99,11
53	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.427.770.000	2.427.770.000	100
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	756.100.000	750.943.200	99,32
54	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	756.100.000	750.943.200	99,32
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.352.489.878	1.338.473.600	98,96
55	Penyusunan Standar Harga	49.999.980	48.556.100	97,11
56	Penatausahaan Barang Milik Daerah	355.586.800	355.484.137	99,97
57	Pengamanan Barang Milik Daerah	554.210.214	542.517.216	97,89
58	Penilaian Barang Milik Daerah	175.896.880	175.721.580	99,90
59	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	216.796.004	216.194.567	99,72

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,01	n/a	n/a	7.442.006.726	7.331.377.676	98,51%	n/a
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	n/a	n/a				
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%	100%	100%	353.843.629.538	350.741.937.586	99,12%	0,88%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	712.868.974	683.030.750	95,81%	4,19%
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	60%	71%	119%	1.352.489.878	1.338.473.600	98,96%	41%
Efisiensi (Sasaran 2 & 3)									15,34%
Nilai Efisiensi (Sasaran 2 & 3)									88,35%

Analisis akuntabilitas kinerja BKAD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk mengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Secara umum pencapaian BKAD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah dituangkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2022, BKAD Kabupaten Kapuas Hulu telah berupaya melakukan peningkatan kualitas perencanaan dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala, meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan bimbingan teknis dan/atau pelatihan, menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan, serta pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKAD Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil mencapai kinerja **106,33%** dari target berdasarkan skala ordinal rata-rata capaian indikator yang tersedia dan masuk dalam kategori **"sangat berhasil"**.
3. Dari tiga sasaran strategis, terdapat dua sasaran yang kinerjanya sudah sesuai dan melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:
 - a. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencapai kinerja sebesar 100% untuk masing-masing indikator kinerja dengan efisiensi anggaran berturut-turut 0,88% dan 4,19%.
 - b. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah mencapai kinerja sebesar 119% dengan efisiensi anggaran 41%.
 - c. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah belum dapat ditampilkan capaian kinerja karena sedang dalam tahapan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dan belum dilaksanakan reviu atas PMPRB Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk periode RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Dalam LKjIP ini disajikan capaian kinerja tahun 2022 milik BKAD Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat dievaluasi, dan sebagai bahan masukan bagi BKAD Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya.

Selama tahun 2022 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja, sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencapai kinerja sebesar 100%, sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah mencapai kinerja sebesar 119%, sedangkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah belum dapat disertakan hasil capaiannya karena saat ini sedang dilaksanakan tahapan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dan belum dilaksanakan reviu atas PMPRB BKAD Kab. Kapuas Hulu tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih terbatas,
2. Sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi para pegawai agar lebih berkompeten dan profesional di dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan terencana.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan.